

Analisis Akuntabilitas dan Efektifitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Ria (Studi Kasus Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Mirawati Lompeng^{1*}, Maslichah², M. Cholid Mawardi³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi:: 21801082121@unisma.ac.id

ABSTRACT

Village funds are one of the sources of budget procurement in the village for help the village community in developing the village economy besides that village funds are channeled to BUMDes because BUMDes is one of the institutions that will build and support the economy of the village community. This study aims to determine the level of accountability and effectiveness of village fund management through village-owned enterprises in West Riung District Ngada Regency. This research method uses descriptive qualitative methods using primary data and secondary data. Methods of data collection using interview and documentation techniques. Based on the results of research conducted by researchers that the accountability of village funds channeled through BUMDes financial management is not in accordance with applicable regulations while the effectiveness of village funds channeled through BUMDes has been effective because it has an impact on the community.

Keywords: Accountability, effectiveness, village fund, BUMDes

ABSTRAK

Dana desa merupakan salah satu sumber pengadaan anggaran di desa untuk membantu masyarakat. Desa dalam membangun ekonomi desa selain itu dana desa disalurkan ke BUMDes karena BUMDes merupakan salah satu lembaga yang akan membangun dan menopang perekonomian masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Akuntabilitas dan Efektivitas pengelolaan dana desa melalui badan usaha milik desa di Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memakai data primer maupun data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Akuntabilitas dana desa yang disalurkan melalui BUMDes pengelolaan keuangannya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku sedangkan Efektivitas dana desa yang disalurkan melalui BUMDes sudah efektif karena sudah berdampak pada masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, efektivitas, dana desa, BUMDes

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Aspek perekonomian di Indonesia tepatnya lembaga zona publik hadapi tekanan buat lebih efisien dalam memperhitungkan bayaran ekonomi dan sosial dalam pemanfaatannya kepada publik biar meminimalisir akibat negatif atas aktivitas yang dicoba. Dengan demikian ilmu akuntansi jadi suatu pedoman yang dibutuhkan buat mengelola urusan- urusan publik. Dalam penerapan akuntansi zona publik harus didasari dengan prinsip transparansi dan akuntabel. Penerapan akuntansi zona publik tidak hanya ada dalam cakupan wilayah pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah saja namun lebih menjangkau hingga wilayah pedesaan Setiawan (2021).

Tata cara Pengalokasian Dana Desa Masing-masing Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Masing-masing Desa yang mengacu pada letak geografis, jumlah penduduk, dan angka kematian. Tata cara penganggaran dana desa masing-masing daerah kabupaten/ kota dialokasikan secara adil yang mengacu pada jumlah pemberian minimal yang merata buat segala desa, selanjutnya, alokasi dasar dan alokasi formula hendak dihitung buat mengidentifikasi berapa jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin sangat besar. Program Alokasi Dana Desa memiliki sasaran sebaran pada segala wilayah yang ditetapkan sangat membutuhkan di Indonesia buat memberikan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan. Pada realitanya sebaran pembangunan masih sebagian besar nilainya terdapat di pulau Jawa, pulau Jawa dikira memiliki tingkatan kemiskinan sangat kecil dibandingkan pulau yang lain di Indonesia, namun tampaknya di pulau Jawa di sebagian wilayahnya masih bisa dikatakan perlu penindakan istimewa buat tingkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan Wicaksono et al (2019).

Pembangunan wilayah ada dari bagian integral pembangunan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi wilayah. Otonomi wilayah ialah sesuatu langkah dini mengarah pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya berkembang besar dengan membagikan kehidupan yang lebih baik untuk warga di wilayah. Asas yang jadi prinsip bawah otonomi merupakan otonomi luas, nyata serta bertanggungjawab. Prinsip ini mencermati aspek demokrasi, partisipasi, adil serta menyeluruh dengan senantiasa mencermati kemampuan serta keragaman wilayah. Bersumber pada asas tersebut, diharapkan otonomi wilayah sanggup memesatkan terwujudnya kesejahteraan warga wilayah. Kesejahteraan warga memanglah jadi tujuan utama dari kebijakan otonomi sebagaimana tuntutan di kala reformasi digulirkan. Tujuan tersebut cuma bisa terwujud dengan terdapatnya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah wilayah Arina et al (2021)

BUMDes ialah suatu badan usaha seluruh atau sebagian besar modalnya milik desa melalui penjelasan secara langsung yang berdasarkan dari kekayaan desa dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Nomor 4 Tahun 2015 diamanatkan bahwa pendirian BUMDes bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (*Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (DPDTT) Nomor 4 Tahun 2015 - Penelusuran Google*, 2015).

BUMDes diharapkan untuk menjadi sebuah pelopor dengan melakukan kegiatan ekonomi di desa juga bisa berfungsi sebagai suatu lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada semua kepentingan masyarakat dalam kontribusinya untuk menyelenggarakan dalam menyediakan pelayanan sosial, sedangkan lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari sebuah keuntungan bisa meningkatkan pendapatan di desa tersebut.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Analisis Akuntabilitas Dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ria, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas serta efektifitas pengelolaan dana desa melalui badan usaha milik Desa di Desa Ria Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bagaimana akuntabilitas serta efektivitas pengelolaan BUMDes di Desa Ria Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tujuan penelitian

1. Mengetahui Pengelolaan BUMDes di Desa Ria Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Mengetahui akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan BUMDes Desa Ria Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Desa

Bagi peraturan Undang- Undang pemerintah no 16 tahun 2018 dana desa ialah penafsiran selaku berikut ialah Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri yang diperuntukkan untuk Desa yang ditransfer lewat Anggaran Pemasukan serta Belanja Wilayah kabupaten/ kota serta digunakan buat mendanai penyelenggaraan pemerintahan, penerapan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan warga (*Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, Serta Transmigrasi Republik Indonesia*, 2018).

Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah bentuk dari tata kelola yang baik dalam sesuatu organisasi pelayanan warga. Wujud pertanggungjawaban direalisasikan dalam wujud laporan, mulai dari proses perencanaan, penerapan, pengelolaan, sampai pertanggungjawaban guna melindungi keyakinan warga serta melindungi eksistensi tubuh usaha sehingga bisa diukur sepanjang mana keberhasilan akuntabilitas organisasi pelayanan warga Setiawan (2021).

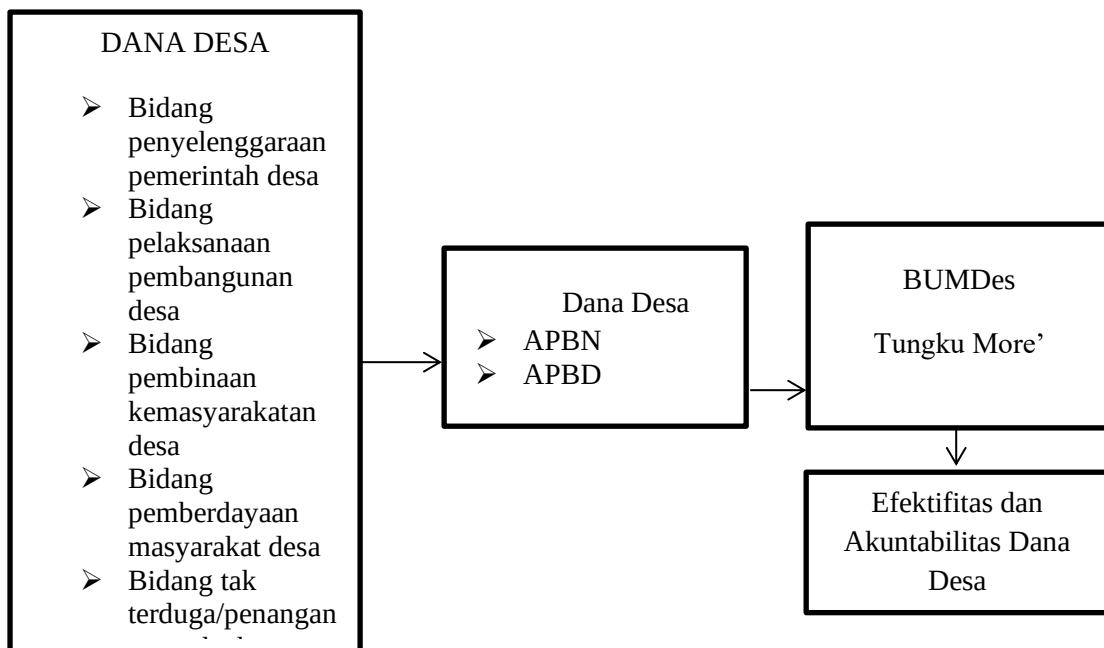
Efektivitas

Daya guna ialah sesuatu faktor pokok yang telah menggapai tujuan ataupun sasaran yang sudah ditetapkan di dalam tiap organisasi, aktivitas maupun program. Setiawan (2021)

Badan Usaha Milik Desa(BUMDES)

Undang- Undang No 17 Tahun 2018 tentang BUMDes menegaskan peran BUM Desa selaku tubuh hukum yang didirikan oleh Desa serta/ ataupun bersama Desa- Desa guna mengelola usaha, menggunakan peninggalan, meningkatkan investasi serta produktivitas, sediakan jasa pelayanan, serta ataupun sediakan tipe usaha yang lain yang sebesar- besarnya selaku sesuatu wujud kesejahteraan warga Desa.

Kerangka Konseptual



METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Riset menggunakan metode kualitatif deskriptif, ialah laporan riset akan berisi kutipan-kutipan data memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data bisa berasal dari naskah wawancara, lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, serta dokumen resmi lainnya. demikian, riset akan memberikan gambaran tentang Tata Kelola Dana Desa Husmayanti (2021).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi riset ialah Desa Ria, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu digunakan meneliti penelitian ini dimulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan selesai.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data digunakan dalam penelitian ini ada dua ialah sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data Primer

Data primer ialah subjek riset dijadikan sumber informasi penelitian untuk menggali keterangan yang lebih dalam serta sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya, dalam hal ini menggunakan istilah wawancara/interview. Yang dirasa memiliki pengetahuan dan informasi terkait dengan masalah penelitian.

Maka sumber data yang disebut informan yaitu, orang yang memberikan informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Pemerintah Desa

- Kepala Desa, sebagai penasihat pengelolaan BUMDes.
- Bendahara, sebagai pelaksana operasional keuangan BUMDes

- Masyarakat, BUMDes sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

b. BUMDes

- Kepala BUMDes, sebagai pelaksana operasional dalam menyusun rencana kerja dan pelaksanaan rencana kerja BUMDes
- Bagian keuangan BUMDes adalah mencatat keuangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah suatu kejadian masa lampau dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan atau karya, Sedangkan dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data diperlukan suatu permasalahan penelitian lalu dianalisis secara intens bisa mendukung dan menambah kepercayaan pembuktian suatu kejadian.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam pendekatan kualitatif sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah interaksi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah satunya yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti dan dimana salah satu menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Yaitu dengan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan tema yang peneliti angkat dengan tema yang telah ditentukan Yuniati (2021).

2. Dokumentasi

Dokumen ini sebagai pelengkap hasil dari Wawancara Wijaya (2018). Bentuk dokumen ini seperti gambar dan tulisan. Dokumentasi yang digunakan peneliti seperti profil, struktur organisasi, visi dan misi, maksud dan tujuan, jenis usaha atau program yang dijalankan, laporan anggaran dana desa dan laporan anggaran BUMDes Desa Ria

3. Metode Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses inspeksi, pembersihan dan Pemodelan data tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan serta mendukung pengambilan keputusan. Teknik Sihombing (2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas

Diketahui bahwasanya Akuntabilitas memiliki arti yaitu wujud dari tata kelola keuangan yang baik sehingga jika dilihat dari penelitian ini peneliti mengukur akuntabilitas dengan melihat tata kelola dari objek penelitian yaitu pada BUMDes Tungku More Desa Ria. Dalam mengukur akuntabilitas peneliti menggunakan hasil dari wawancara dan telaah dokumen keuangan dengan cara mengumpulkan hasil dari wawancara dan membandingkan dokumen keuangan dengan peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11/2018 tentang pengelolaan dana desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes). Dari hasil membandingkan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Akuntabilitas dari BUMDes Tungku More itu belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan pengelolaan dan pencatatan keuangan masih secara manual dan tidak dilaporkan secara rinci.

Efektivitas

Efektivitas dalam pengelolaan dana desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Ria dapat diukur dengan beberapa kategori diantaranya dapat membandingkan tujuan program, ketetapan program, dan waktu penyelenggaraan program yang dijalankan oleh BUMDes Tungku More Desa Ria seperti program usaha sewa menyewa tenda pernikahan dan mesin las dan hasil dari program yang sedang berjalan. Dari hasil membandingkan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa program BUMDes Tungku More ini sudah efektif karena sudah berdampak pada masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes) pada Desa Ria laporan keuangannya belum sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku.
2. Efektivitas dalam pengelolaan dana desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes) pada Desa Ria dalam menjalankan program unit usahanya sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa indikator efektivitas yang belum dilaksanakan seperti Ketepatan waktu, Ketepatan dalam menentukan pilihan, Ketepatan dalam menentukan tujuan, Ketepatan Berpikir, Ketepatan dalam melakukan perintah dan Ketepatan sasaran sehingga menyebabkan kurangnya efektivitas dimana ada beberapa program atau unit usaha yang kurang berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

Keterbatasan

Dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilaksanakan peneliti memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Karena keterbatasan waktu peneliti tidak dapat meninjau lebih mendalam tentang objek yang sedang diteliti.
2. Kesulitan transportasi untuk bertemu narasumber dan kesulitan jaringan.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam pada objek sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang objek yang sedang diteliti.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih meninjau lokasi dan keadaan dari objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Husmayanti, R. (2021). Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnalmahasiswa.Umsu.Ac.Id*, 1, 1–11.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPD TT) Nomor 4 Tahun 2015 - Penelusuran Google*. (2015).
- Setiawan, M. A. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sungsang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat*.
- Sihombing, L. (2018). *Pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang*.
- Wicaksono, G., Puspita, Y., Cipta Bidhari, S., Dwi Kusumaningrum, N., & Asmandani, V. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso.
- Yuniati. (2021). *Efektivitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi kasus Desa Batu Nampar, Lombok Timur*.